

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini bank memegang peran penting, karena jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”, yaitu : “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.” Mentaati peraturan dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan simpati baik dari nasabah ataupun non nasabah. (Sukadwilinda dan R. Aryanti Ratnawati, 2013). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP, perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, yaitu dengan upaya pencegahan, pendeteksian, investigasi dan pemantauan dalam mengendalikan *fraud*.

Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalknya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. (Karyono, 2013:4-5).

Menurut Steve Alberecht dan Alvin A. Arend CS bahwa fraud terdiri dari tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). Faktor pertama yaitu tekanan (*pressure*) adalah dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) untuk melakukan kecurangan, kemudian faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*) kesempatan timbul terutama lemahnya

pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, dan faktor terakhir yaitu pembenaran (*rationalization*) bahwa pelaku kecurangan menganggap yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa atau wajar yang tujuannya baik untuk mengatasi masalah. Kecurangan juga terdiri atas empat kelompok yaitu kecurangan laporan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*aset Misappropriation*), korupsi (*corruption*) dan kecurangan yang berkaitan dengan computer. (Karyono, 2013:8-17)

Dalam kasus pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) munculnya tindak pencurian data elektronik atau *skimming* Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi trauma bagi masyarakat terutama nasabah di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cimahi yang berlokasi di Jalan Amir Machmud, mendadak ramai karena didatangi ratusan nasabah. Mereka mengaku panik setelah mendapat kabar adanya nasabah Bank BRI yang saldonya raib terkena aksi *skimming*. Awalnya, para nasabah menerima pesan singkat dari pihak BRI yang berisi penonaktifan kartu ATM kemudian, nasabah diminta untuk mengganti kartunya di Kantor BRI terdekat, setelah di lakukan pengecekan oleh nasabah melalui mesin ATM ternyata sudah di blokir oleh pihak bank.

Selain itu ada salah seorang korban *skimming* lainnya, Tresna Pamungkas (37), sangat menyayangkan atas layanan keamanan pihak bank. Saldo tabungan miliknya itu tiba-tiba berkurang setelah mendapat SMS dari pihak bank BRI sebanyak tiga kali. Selang waktunya pun hanya beberapa menit saja. SMS awal masuk pada pukul 20.24 Wib, kemudian pukul 20.25 Wib dan pukul 20.26 Wib. Akibatnya, ia harus mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000. Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak bank untuk tidak menindaklanjuti kasus *skimming* ini. Sebab, yang menjadi korban *skimming* ini tidak hanya dirinya saja. Bahkan, dengan adanya kejadian *skimming* ini ia menilai bahwa, teknologi bank BRI mudah diretas. Sehingga mengakibatkan kerugian banyak orang. Sementara itu, pihak bank BRI Cabang Cimahi tidak dapat memberikan keterangan. Mereka hanya mengarahkan untuk konfirmasi ke kantor pusat dengan alasan segala kebijakan untuk memberikan keterangan ada di kantor pusat. (Azam)

Kegagalan pencegahan kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dalam organisasi. Tindakan utama untuk pencegahan fraud adalah untuk menciptakan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang andal pada aktivitas organisasi. Kegagalan pencegahan kecurangan (*fraud*) terjadi pula karna faktor modal, dan etika pada pihak intern organisasi maupun luar organisasi. Selain masalah modal dan etika, kegagalan pencegahan kecurangan (*fraud*) juga di sebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. (Karyono, 2013:85-86)

Pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organization Commission* (COSO) mendefinisikan pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Adapun 5 komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan aktivitas pemantauan.

Dengan adanya pengendalian internal yang baik pada perbankan, maka pemeriksaan intern diharapkan dapat menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian tersebut untuk membatasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan diketahui bahwa dengan pengendalian intern yang baik dan adanya suatu tindakan dari perusahaan melaporkan kasus terjadinya *fraud* untuk mencegah terjadinya fraud (Wuri, 2009)

Pengendalian dapat tercapai apabila perusahaan terus mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur yang telah dibuat secara berkesinambungan. Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat mengakibatkan munculnya kecurangan akuntansi di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh manajemen dalam penerapan Pengendalian Internal agar kecurangan dapat diminimalisir. (Nadya: 2016)

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), diantaranya adalah **Suginam (2017)** berpendapat bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

fraud akan tetapi hasil tidak signifikan. Adapun Sukadwilinda dan R. Aryanti Ratnawati Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengendalian internal berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi kasus pada Bank BRI Cabang Cimahi)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, guna mempermudah pembahasan masalah yang telah dirumuskan maka dalam penelitian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Cimahi telah terjadi tindak pencurian data elektronik atau *skimming*.
2. Terjadinya kecurangan disebabkan karena kurangnya pengendalian internal yang dimiliki perusahaan
3. Kurangnya pengendalian internal mempengaruhi terjadinya kecurangan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Cimahi

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan maka penelitian ini dibatasi untuk membahas pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pengendalian internal pada Bank BRI
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pencegahan kecurangan pada Bank BRI

3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Bank BRI

